KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2017

TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapat izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2016 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2017.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2017
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

MATRIK USULAN PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Bangunan dan Instalasi di Laut												
2.	Peraturan Pemerintah	Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
3.	Peraturan Pemerintah	Perencanaan Ruang Laut												
4.	Peraturan Pemerintah	Rencana Tata Ruang Laut Nasional												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Peraturan Pemerintah	Izin Lokasi di Laut yang Berada di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif												
6.	Peraturan Presiden	Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing												
7.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Kawasan Laut Jawa												
8.	Peraturan Presiden	Rencana Zonasi Kawasan Laut Makassar												
9.	Keputusan Presiden	Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar												
10.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Nipa												
11.	Peraturan Menteri	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Maratua												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
12.	Peraturan Menteri	Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi (*App CITES*)												
13.	Peraturan Menteri	Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi												
14.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PRL												
15.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
16.	Peraturan Menteri	Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman												
17.	Peraturan Menteri	Kelas Jabatan, Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir												
18.	Peraturan Menteri	Larangan Pengeluaran Ikan Pari Mobula dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
19.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Banggai Cardinal												
20.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu												
21.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Ikan Mola-Mola												
22.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Napoleon												
23.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Terubuk												
24.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Bambu Laut												
25.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta												
26.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu												
27.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Mentawai												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
28.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tambrauw												
29.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nias Utara												
30.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Belitung Timur												

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Tata Cara Pemberian Subsidi												
2.	Peraturan Menteri	Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia												
3.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan												
4.	Peraturan Menteri	Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas												
6.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap												
7.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
8.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap												
9.	Peraturan Menteri	Inpassing Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap												
10.	Keputusan Menteri	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN)												

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Pembudidayaan Ikan												
2.	Peraturan Menteri	Usaha Pembudidayaan Ikan												
3.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik												
4.	Peraturan Menteri	Pakan Ikan												
5.	Peraturan Menteri	Obat Ikan												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Pembudidayaan Rumput Laut												
7.	Peraturan Menteri	Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam												

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Presiden	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)												
2.	Peraturan Menteri	Usaha Pengolahan Ikan												
3.	Peraturan Menteri	Kemitraan Usaha Pada Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Sektor Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP)												
5.	Peraturan Menteri	Sertifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan												
6.	Keputusan Menteri	Pemberlakuan Penerapan Standar Nasional Indonesia 6 (Enam) Produk Perikanan Nonkonsumsi												
7.	Keputusan Menteri	Penetapan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan												

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Surat Laik Operasi Kapal Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan												
3.	Peraturan Menteri	Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Penanganan Tindak Pidana Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Berbendera Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan												

6. Inspektorat Jenderal

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Mnteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi												

7. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang												
2.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang												
3.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone												
4.	Peraturan Menteri	Kurikulum Sekolah Tinggi Perikanan Edisi 2017												

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan												
2.	Peraturan Menteri	Pelaksanaan Indonesia *Single Risk Management* di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu												
4.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina												
5.	Peraturan Menteri	Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
6.	Peraturan Menteri	Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan												
7.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan												
8.	Peraturan Menteri	Pedoman dan Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu												

9. Biro Perencanaan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan												
2.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019												
4.	Peraturan Menteri	Pedoman Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Monitoring Terpadu Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan												
6.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2015 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019												
7.	Keputusan Menteri	Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019												
8.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja) Tahun 2018												

10. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Peraturan Menteri	Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2015 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

11. Biro Keuangan

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Pengoperasian Sarana dan Prasarana Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dibangun Oleh Pemerintah Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												

12. Biro Hukum dan Organisasi

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Pemerintah	Tata Cara Pengawasan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam												
2.	Peraturan Presiden	Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan												
3.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan												
4.	Peraturan Menteri	Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
5.	Peraturan Menteri	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
6.	Peraturan Menteri	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari												

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
7.	Keputusan Menteri	Penetapan Nama Jabatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan												
8.	Keputusan Menteri	Penetapan Bisnis Proses di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
9.	Keputusan Menteri	Penetapan Uraian Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
10.	Keputusan Menteri	Pedoman Standar Penghitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												

13. Biro Umum

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2013 tentang Keprotokolan												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan												

14. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												

15. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

No	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Master Plan dan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan												
2.	Peraturan Menteri	Satu Data Kelautan dan Perikanan												

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Tini Martini